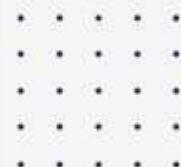


2024

LAPORAN PROGRAM



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)



Prepared by:

Bidang
Kualitas
Hidup
Perempuan

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dahlia No.1 Kompleks Balaikota Samarinda (0541)743307

dpppaakotasamarinda@yahoo.com | dpppaakotasamarinda@yahoo.com

www.dp2pasamarinda.com | www.gesit.org



LAPORAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SAMARINDA TAHUN 2024



Disusun Oleh :

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Staff Bidang Kualitas Hidup Perempuan

SAMARINDA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan **Program Pengarusutamaan Gender (PUG)** ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di berbagai bidang telah mempertimbangkan aspek gender secara adil dan proporsional. Melalui implementasi program ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan yang menghambat peran serta, akses, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Laporan ini memuat berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Selain itu, laporan ini juga berisi analisis capaian serta rekomendasi untuk penguatan strategi pengarusutamaan gender di masa yang akan datang. Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat memberikan referensi dan wawasan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga mitra, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam implementasi program ini. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik, program ini tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan.

Demikian laporan ini kami susun. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi upaya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kepala Bidang
Kualitas Hidup Perempuan



Syarifuddin Nur, S.E., M.M
197411052001121009

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Program 2

1.3 Sasaran Program 4

BAB 2 : PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Rincian Program8

2.1.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
kewenangan Kabupaten/Kota.....8

2.1.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota9

2.1.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota11

2.2 Rincian Sub Kegiatan

2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota14

2.2.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan
Kab/Kota25

2.2.3 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota28

2.2.4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan
dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi31

2.2.5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota34

2.2.6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota38

BAB 3 : HASIL DAN EVALUASI

3.1 Capaian Program 42

3.2 Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG 43

3.3 Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 45

3.4 Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)47

BAB 4 : PENUTUP

4.1 Rencana Tindak Lanjut 49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam berbagai sektor, masih ditemukan adanya ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif serta memberikan manfaat yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, serta pengalaman perempuan dan laki-laki diperhitungkan secara setara dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan maupun program di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan lingkungan.

Implementasi PUG didasarkan pada berbagai kebijakan nasional maupun internasional yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender. Di tingkat global, komitmen terhadap kesetaraan gender telah tertuang dalam berbagai instrumen, seperti **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**, **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)**, serta **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, khususnya pada tujuan ke-5 yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan, seperti **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional**, yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan PUG di Indonesia. Selain itu, berbagai kebijakan sektoral juga telah diintegrasikan dengan perspektif gender untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendukung implementasi PUG, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

1. **Kurangnya Pemahaman tentang PUG** – Banyak pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat PUG, sehingga implementasinya belum optimal.
2. **Terbatasnya Data Terpilah Berdasarkan Gender** – Data yang terpilah berdasarkan gender sangat diperlukan dalam perencanaan program, tetapi sering kali masih kurang tersedia.
3. **Minimnya Anggaran Berbasis Gender** – Pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan perspektif gender masih perlu ditingkatkan agar program-program pembangunan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
4. **Kendala Budaya dan Sosial** – Norma dan nilai-nilai budaya yang masih bersifat patriarki sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender.
5. **Koordinasi dan Sinergi yang Belum Optimal** – Pelaksanaan PUG membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mengimplementasikan PUG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan, memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, serta memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan perspektif gender.

Dengan adanya Program Pengarusutamaan Gender, diharapkan tercipta pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

1.2 Tujuan Program

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bersifat inklusif serta memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berangkat dari kesadaran bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan lingkungan.

Secara umum, tujuan utama dari Program PUG adalah:

1. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Program PUG bertujuan untuk mengurangi serta menghilangkan kesenjangan gender yang masih terjadi dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, serta manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Kesetaraan gender dalam pembangunan akan

mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara lebih adil dan merata.

2. Mengintegrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan

Salah satu tujuan utama PUG adalah memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang dibuat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

3. Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat Pembangunan bagi Perempuan dan Laki-laki

PUG bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, mengontrol keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan. Keempat aspek ini—akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat—harus berjalan beriringan agar kesetaraan gender dapat benar-benar terwujud dalam berbagai sektor.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kesadaran Pemangku Kepentingan terhadap Pentingnya PUG

Kesuksesan implementasi PUG sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya perspektif gender dalam pembangunan. Kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan advokasi menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan ini.

5. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Terpilah Berdasarkan Gender

Salah satu tantangan utama dalam penerapan PUG adalah minimnya data yang terpisah berdasarkan gender. Data ini sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, PUG bertujuan untuk mendorong pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data terpisah berdasarkan gender dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berbasis bukti.

6. Mendorong Penganggaran Responsif Gender (Gender Responsive Budgeting - GRB)

Agar kebijakan yang telah mempertimbangkan perspektif gender dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran yang sesuai. PUG bertujuan untuk mendorong penganggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting) di berbagai sektor, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat benar-benar mendukung pencapaian kesetaraan gender.

7. Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender

Diskriminasi berbasis gender, baik dalam bentuk kebijakan, praktik sosial, maupun budaya, masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan gender. Oleh karena itu, PUG

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang merugikan salah satu kelompok berdasarkan gender, termasuk diskriminasi dalam dunia kerja, pendidikan, partisipasi politik, serta akses terhadap layanan publik.

8. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga dalam Implementasi PUG

PUG bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat antara berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama program ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan strategi PUG secara lebih efektif.

9. Mendorong Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

PUG bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan. Dengan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan mampu mewakili kepentingan semua kelompok masyarakat.

10. Membangun Masyarakat yang Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Secara keseluruhan, tujuan akhir dari PUG adalah menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis, di mana tidak ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan karena perbedaan gender. Dengan mewujudkan kesetaraan gender, diharapkan masyarakat dapat berkembang dengan lebih baik dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional.

Kesimpulan

Dengan adanya Program Pengarusutamaan Gender, diharapkan semua kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Implementasi PUG memerlukan komitmen, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.3 Sasaran Program

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dirancang untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini memiliki sasaran utama yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat individu, komunitas, maupun kelembagaan.

Berikut adalah sasaran utama dari Program Pengarusutamaan Gender:

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sasaran utama dalam implementasi PUG. Hal ini karena pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan

kebijakan, regulasi, serta program pembangunan yang harus responsif terhadap gender. Sasaran dalam kelompok ini meliputi:

- **Lembaga Eksekutif** (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan berbasis gender.
- **Lembaga Legislatif** (DPR/DPRD) yang memiliki peran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan gender.
- **Lembaga Yudikatif** (Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama) yang memastikan adanya keadilan hukum bagi semua gender dan menangani kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis gender.

Melalui PUG, pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, serta evaluasi kebijakan publik.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemangku Kebijakan

Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan juga menjadi sasaran utama dalam implementasi PUG. Mereka memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan telah mempertimbangkan aspek gender. Oleh karena itu, PUG menargetkan peningkatan kapasitas dan pemahaman ASN terkait dengan:

- **Prinsip dasar kesetaraan gender** dalam kebijakan publik dan pembangunan.
- **Penerapan anggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting/GRB)** dalam proses perencanaan dan penganggaran di berbagai sektor.
- **Penyediaan data dan informasi terpilah berdasarkan gender** untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan ASN dan pemangku kebijakan dapat lebih efektif dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender di setiap level pemerintahan.

c. Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu, PUG juga menasar:

- **Sekolah dan Perguruan Tinggi**, dengan tujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi gender.
- **Dosen, Guru, dan Tenaga Pendidik**, agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengajarkan konsep kesetaraan gender kepada peserta didik.
- **Pusat Penelitian dan Akademisi**, yang berperan dalam menyediakan kajian dan penelitian berbasis gender guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta.

Dengan melibatkan sektor pendidikan, diharapkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dapat tertanam sejak dini dan menjadi bagian dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh generasi mendatang.

d. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Peran sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Sasaran dalam kelompok ini meliputi:

- **Perusahaan dan pelaku usaha** yang diharapkan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis gender, termasuk penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pembayaran gaji.
- **Serikat pekerja dan organisasi profesi** yang dapat berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung pekerja perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- **Media massa dan industri kreatif**, yang dapat berkontribusi dalam membangun opini publik yang mendukung kesetaraan gender serta menghindari penyebaran stereotip gender dalam pemberitaan dan produksi konten media.

Melalui pendekatan ini, dunia usaha diharapkan dapat lebih aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi laki-laki dan perempuan, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

e. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan LSM

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi PUG, terutama dalam:

- **Melakukan advokasi dan pemantauan** terhadap kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender.
- **Memberikan edukasi dan pendampingan** kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi gender.
- **Menjembatani komunikasi** antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi gender.

Dengan melibatkan OMS dan LSM, diharapkan implementasi PUG dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

f. Kelompok Perempuan dan Masyarakat Rentan

PUG juga menargetkan kelompok perempuan dan masyarakat rentan, yang sering kali mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sasaran utama dalam kelompok ini meliputi:

- **Perempuan di berbagai sektor**, termasuk perempuan pekerja, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, dan perempuan di daerah pedesaan.

- **Anak-anak dan remaja**, yang memerlukan perlindungan dari kekerasan berbasis gender serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang setara.
- **Kelompok disabilitas**, yang sering kali menghadapi hambatan dalam akses terhadap layanan publik, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
- **Kelompok minoritas dan masyarakat adat**, yang sering mengalami diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak dasar.

Melalui PUG, diharapkan kelompok-kelompok ini dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan politik.

g. Masyarakat Secara Umum

Kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas tentang pentingnya kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir dan budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah. Oleh karena itu, PUG juga menargetkan :

- **Keluarga dan komunitas**, agar menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola asuh anak, pembagian peran domestik, dan partisipasi dalam masyarakat.
- **Tokoh agama dan tokoh masyarakat**, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong nilai-nilai kesetaraan gender.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PUG, diharapkan terjadinya perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program Pengarusutamaan Gender memiliki sasaran yang luas dan mencakup berbagai sektor dalam masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat secara umum, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan.

PUG bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Rincian Program

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) mencakup berbagai kegiatan strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bersifat inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi semua gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini dibagi ke dalam beberapa aspek utama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum.

Berikut adalah rincian program Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan pada tahun 2024 :

2.1.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota

a. Revitalisasi PUG

Revitalisasi PUG menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program ini berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Revitalisasi PUG bertujuan untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kapasitas, serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan PUG agar dapat lebih berdaya guna dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas di semua sektor pembangunan.

Revitalisasi Program Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan PUG secara lebih sistematis dalam kebijakan, program, dan anggaran di seluruh sektor dan tingkatan pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan strategi PUG, termasuk aparatur negara, pemimpin organisasi, dan masyarakat sipil.
4. Memastikan keberlanjutan kebijakan berbasis gender, sehingga kesetaraan gender tidak hanya menjadi target administratif tetapi juga bagian dari budaya kerja institusi.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi PUG, termasuk dalam penganggaran responsif gender.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan data gender dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

Arahan Wali Kota terkait Revitalisasi PUG di kota Samarinda pada tahun 2024 melalui Surat Edaran Nomor : 100/2512/100.18

2.1.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, hukum, sosial, maupun ekonomi. Di tingkat Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ini. Berikut adalah uraian mengenai pemberdayaan perempuan dalam empat bidang tersebut:

a). Bidang Politik

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di tingkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

- **Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif:** Organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik itu di tingkat Kabupaten, Kota, maupun DPRD. Pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan di tingkat lokal dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik.
- **Penguatan Jaringan Perempuan:** Organisasi kemasyarakatan juga dapat mendukung perempuan dalam membentuk jaringan politik, yang bertujuan untuk berbagi informasi, membangun solidaritas, serta meningkatkan kekuatan politik perempuan di tingkat lokal.
- **Kampanye Kesadaran Politik:** Organisasi dapat melaksanakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak politik mereka, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

b). Bidang Hukum

Dalam bidang hukum, pemberdayaan perempuan berfokus pada perlindungan hak-hak hukum perempuan serta pemberdayaan mereka untuk dapat mengakses sistem hukum dengan adil dan setara. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

- **Penyuluhan Hukum:** Organisasi kemasyarakatan dapat memberikan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, seperti hak atas pekerjaan yang setara, hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi.
- **Advokasi Hukum:** Organisasi juga dapat melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, seperti

mendorong peraturan daerah (Perda) yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau diskriminasi gender.

- **Akses ke Layanan Hukum:** Organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan atau ketidakadilan hukum.

c). Bidang Sosial

Pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam masyarakat serta mengurangi ketimpangan sosial.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota antara lain:

- **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Organisasi kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti pelatihan keterampilan rumah tangga, kerajinan tangan, atau kewirausahaan, yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di masyarakat.
- **Peningkatan Kesadaran Sosial:** Organisasi dapat mengadakan kampanye sosial mengenai pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan norma-norma yang mendukung kesetaraan gender.
- **Pemberdayaan Kelompok Perempuan:** Organisasi kemasyarakatan juga dapat membentuk kelompok perempuan di tingkat desa atau kelurahan untuk memperkuat solidaritas antar perempuan, berbagi pengalaman, serta membahas isu-isu yang dihadapi oleh perempuan di tingkat lokal.

d). Bidang Ekonomi

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam berbagai kegiatan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain:

- **Pemberian Modal Usaha:** Organisasi dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses modal bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).
- **Pelatihan Kewirausahaan:** Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, seperti cara mengelola keuangan usaha, pemasaran produk, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha, menjadi penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
- **Peningkatan Akses Pekerjaan:** Organisasi kemasyarakatan dapat membantu perempuan dalam mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan,

serta memberikan pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran kunci dalam menggerakkan inisiatif-inisiatif pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, pemberdayaan perempuan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota adalah langkah penting untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan yang diberikan. Lembaga-lembaga ini memainkan peran strategis dalam memberikan dukungan kepada perempuan, baik dalam hal pemenuhan hak, perlindungan dari kekerasan, peningkatan keterampilan, maupun partisipasi dalam proses pembangunan. Berikut adalah uraian mengenai penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga ini di tingkat Kabupaten/Kota:

a) Penguatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan

Penguatan kapasitas lembaga yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Penguatan ini melibatkan berbagai aspek, antara lain:

- **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):** Lembaga penyedia layanan perlu memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkompeten dalam menangani isu-isu pemberdayaan perempuan. Pelatihan dan pendidikan bagi staf lembaga, seperti pelatihan tentang hak-hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan hak seksual, sangat penting untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan layanan.
- **Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas:** Infrastruktur yang memadai, seperti ruang layanan yang aman dan ramah perempuan, fasilitas pendukung (seperti ruang konseling atau ruang perlindungan sementara), serta teknologi yang dapat mendukung penyampaian layanan secara lebih efisien, juga perlu diperhatikan. Penguatan infrastruktur ini memastikan bahwa lembaga dapat memberikan layanan yang berkualitas dan aksesibel bagi perempuan.

- **Peningkatan Kemitraan dan Kolaborasi:** Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta memperkuat sistem dukungan bagi perempuan di tingkat lokal.

b) Pengembangan Program Layanan Pemberdayaan Perempuan

Pengembangan program layanan pemberdayaan perempuan yang relevan dengan kebutuhan lokal merupakan aspek penting dalam penguatan lembaga. Beberapa program yang dapat dikembangkan antara lain:

- **Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak:** Lembaga penyedia layanan harus memiliki program yang khusus menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Program ini mencakup layanan hukum, psikologis, dan medis, serta pemberian perlindungan fisik seperti rumah aman untuk perempuan korban kekerasan.
- **Pelatihan Keterampilan Ekonomi:** Program pelatihan keterampilan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akan membantu perempuan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Lembaga penyedia layanan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta akses ke modal usaha.
- **Penyuluhan dan Edukasi Hak Perempuan:** Program yang berfokus pada edukasi hak-hak perempuan, seperti hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan reproduksi, serta hak untuk bebas dari kekerasan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya. Lembaga penyedia layanan dapat melaksanakan penyuluhan melalui berbagai media, seminar, lokakarya, atau diskusi.
- **Program Kesehatan Reproduksi dan Sexualitas:** Layanan kesehatan reproduksi yang ramah perempuan, termasuk program keluarga berencana dan pencegahan kekerasan seksual, sangat penting. Lembaga dapat bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit untuk menyediakan layanan medis yang mudah diakses oleh perempuan di tingkat lokal.
- **Program Pemberdayaan Politik dan Kepemimpinan:** Lembaga juga perlu mengembangkan program untuk menguatkan peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Program ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, pembekalan keterampilan berbicara di depan umum, atau

pelatihan mengenai hak-hak politik perempuan, yang memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

c) Meningkatkan Akses dan Keterjangkauan Layanan

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberdayaan perempuan adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan mudah diakses dan terjangkau oleh seluruh perempuan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan layanan, antara lain:

- **Mendirikan Pos Layanan di Wilayah Terpencil:** Untuk memastikan layanan sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, lembaga penyedia layanan dapat mendirikan pos layanan di desa-desa atau kecamatan yang jauh dari pusat kota. Pos layanan ini dapat memberikan informasi, konseling, dan bantuan bagi perempuan yang membutuhkan.
- **Pelayanan Mobile:** Layanan mobile atau keliling yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil juga perlu dipertimbangkan, seperti penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, atau pendampingan hukum bagi perempuan di desa-desa.
- **Subsidi Layanan untuk Perempuan Berisiko:** Untuk perempuan yang kurang mampu atau berada dalam situasi darurat, lembaga dapat memberikan subsidi atau bantuan biaya untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau perlindungan hukum.

d) Peningkatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Layanan

Untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif, sangat penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Lembaga perlu mengembangkan sistem untuk:

- **Mengukur Dampak Layanan:** Evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara berkala, untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, mengurangi ketimpangan gender, atau meningkatkan partisipasi politik dan ekonomi perempuan.
- **Mengidentifikasi Hambatan dalam Akses Layanan:** Pemantauan juga berguna untuk mengetahui hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan, seperti stigma sosial, ketidakpahaman terhadap layanan yang tersedia, atau masalah logistik.

e) Pengembangan Kebijakan dan Advokasi

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan juga memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak pada

perempuan. Lembaga penyedia layanan dapat melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk:

- **Mengembangkan Kebijakan yang Mendukung Perempuan:** Lembaga perlu mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti peraturan daerah (Perda) yang melindungi hak-hak perempuan, memberikan insentif bagi lembaga yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan, atau memfasilitasi pembentukan pusat krisis untuk perempuan.
- **Anggaran untuk Program Pemberdayaan Perempuan:** Lembaga penyedia layanan juga perlu melakukan advokasi untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program-program pemberdayaan perempuan, sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses kepada berbagai layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Lembaga ini harus memiliki kapasitas yang baik, program yang relevan dengan kebutuhan perempuan, serta akses yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kerjasama dengan berbagai pihak, serta peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan perempuan dapat diwujudkan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan yang berkelanjutan

2.2 Rincian Sub Kegiatan

2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi PUG se-Kaltim di Kabupaten Berau dengan beberapa hasil diantaranya :

- a. Kegiatan Rakorda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Kalimantan Timur dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Penajam Paser Utara, dengan Tema Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
- b. Melakukan fasilitasi dan mendorong peningkatan kewirausahaan perempuan agar memiliki legalitas usaha atas nama sendiri, pemasaran melalui transformasi elektronik/digital, kemudahan persyaratan untuk bantuan usaha
- c. Memprioritaskan produk kewirausahaan perempuan untuk menjadi pilihan masyarakat dan Pemerintah pada setiap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui e-purchasing
- d. Mempromosikan hasil produk kewirausahaan perempuan melalui perhelatan kegiatan pameran, bazar, dan tempat wisata.
- e. Melakukan sosialisasi kepada kelompok usaha perempuan untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama pelaku usaha perempuan dan melaporkan hasil pendapatan usahanya dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.

- f. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swasta, Perbankan Pemerintah dan Swasta, CSR Perusahaan dan Mitra Eksternal untuk meningkatkan peran dan pendapatan usaha perempuan.
- g. Melakukan kerjasama dengan Instansi yang berkompeten untuk membuat Kajian Pemberdayaan Perempuan melalui Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Kepala Keluarga, Perempuan sebagai Penyintas Kekerasan, dan Perempuan sebagai Pekerja Rentan
- h. Tempat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Timur.



Workshop Revitalisasi PUG sebagai bagian dari Koordinasi dan Sinkronisasi penyelenggaraan PUG. Dilaksanakan di Kabupaten Berau, 21 Februari 2024.



Rapat Koordinasi Focal Point Perangkat Daerah tanggal 8 Mei 2024 membahas capaian PPRG tahun 2023



Rapat Koordinasi POKJA PUG, 20 Mei 2024 membahas persiapan ToT PPRG.



1. Disepakati bahwa evaluasi program tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.
2. Rencana strategis tahun ini mencakup peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi lintas sektor.
3. Ditetapkan beberapa solusi implementasi, termasuk penguatan regulasi internal dan peningkatan alokasi sumber daya.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

Samarinda, 16 Mei 2024

Nomor : 400.2/1085/300.01

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Lembar

Hai : Instruksi Mengikuti ToT PPRG

Yth. (Terlampir)

Di-
Samarinda

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan bagian dari PPRG yang disusun setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari LKPj Walikota.

Untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam menyusun PPRG yang akan langsung dibimbing oleh tenaga ahli diharapkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah Anggota POKJA PUG Kota Samarinda mengirim Perencana Program/Staff yang ditunjuk menangani PUG/PPRG untuk mengikuti ToT PPRG yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang sesuai agenda yang ditawarkan pada tanggal 27 Mei s/d 30 Mei 2024 menggunakan anggaran pada DPA masing masing Perangkat Daerah.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala

Selaku Ketua POKJA PUG

H. Azanta Fathurrozi, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda I (IV/c)

NIP.19681209 198803 1 004

Rekomendasi Kepala Bapperida untuk mengikuti ToT PPRG di Kota Solo menjadi langkah strategis untuk mengejar target peningkatan kualitas SDM terlatih PPRG.

Rapat Penyusunan Informasi Geospasial Gender Tematik pada tanggal 26 Juni 2024

Penyusunan Informasi Geospasial Gender Tematik bertujuan untuk menyediakan data spasial yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis gender. Data ini membantu dalam menganalisis kesenjangan gender dalam berbagai sektor, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.



Data geospasial sarana dan prasarana yang responsif gender sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan aman bagi semua kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa data ini sangat krusial:

1. Perencanaan Infrastruktur yang Inklusif

- Memastikan fasilitas umum seperti transportasi, trotoar, penerangan jalan, dan toilet umum dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua gender.
- Mempermudah aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, perempuan dengan anak kecil, atau penyandang disabilitas.

2. Keamanan dan Keselamatan Publik

- Data geospasial dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kejahatan terhadap perempuan dan anak, sehingga memungkinkan pemasangan pencahayaan yang lebih baik, pos keamanan, atau peningkatan patroli.
- Dapat membantu merancang jalur transportasi yang lebih aman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

3. Distribusi Fasilitas yang Merata

- Dengan data spasial yang responsif gender, pemerintah dapat memastikan distribusi sarana prasarana yang adil, seperti puskesmas, sekolah, dan pusat layanan sosial di daerah yang lebih membutuhkan.
- Menghindari ketimpangan akses terhadap layanan dasar yang sering terjadi akibat perencanaan yang tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gender.

4. Mobilitas yang Lebih Nyaman dan Aman

- Data ini membantu dalam pengembangan transportasi umum yang ramah gender, misalnya dengan menyediakan ruang khusus bagi perempuan di transportasi publik atau jalur yang aman bagi pejalan kaki.
- Mengoptimalkan rute perjalanan yang memperhitungkan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan yang sering beraktivitas di luar rumah.

5. Mendukung Kebijakan dan Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data

- Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
- Data geospasial yang dikombinasikan dengan data sosial-ekonomi dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang paling rentan terhadap akses infrastruktur yang buruk.

Dengan adanya data geospasial yang responsif gender, pembangunan kota Samarinda bisa lebih adil, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang merata bagi semua kelompok masyarakat.

Penyusunan Informasi Geospasial Gender Tematik telah mendapatkan Rekomendasi dari BPS Kota Samarinda melalui Surat Nomor : B-303/64726/KA.110/08/2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA**

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 33 Telp. (0541) 743661

Homepage : <http://samarindakota.bps.go.id> E-mail : bps6472@bps.go.id



Samarinda, 30 Agustus 2024

Nomor : B-303/64726/KA.110/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:
judul : Kompilasi Data Sarana Prasarana Responsif Gender Kota Samarinda
Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **K-24.6472.007**

Rekomendasi : Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

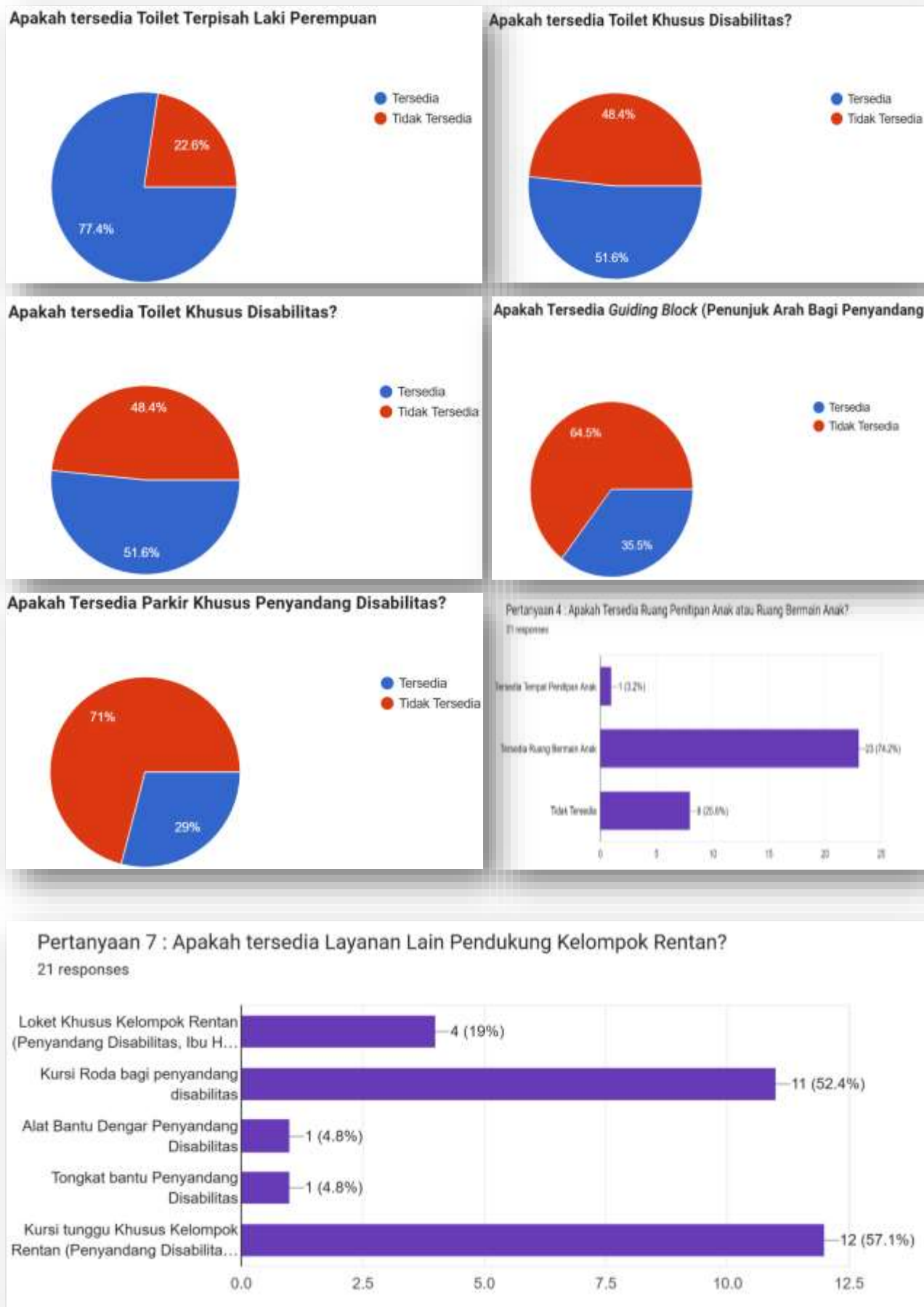
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Samarinda

Roosmawati, SE, MM
NIP. 19661128 199102 2 001

Rekomendasi kegiatan statistik sektoral dari **Badan Pusat Statistik (BPS)** sangat penting karena membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi sektoral memenuhi standar nasional dan internasional serta dapat digunakan secara efektif untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Rekomendasi kegiatan statistik sektoral dari BPS membantu menciptakan sistem statistik yang lebih terstandarisasi, akurat, dan bermanfaat, sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung pembangunan di kota Samarinda.

Data Sarpras Responsif Gender dari Kecamatan & Kelurahan



Koordinasi Strategi PUG "Sinergisme Pentahelix Kota Samarinda Tahun 2024".



Beberapa poin penting yang disepakati dalam koordinasi diantaranya :

a) Pemerintah :

- Memastikan kebijakan PUG diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Penyediaan data dan regulasi yang mendukung implementasi strategi gender.
- Mendorong penganggaran responsif gender (ARG) dalam setiap kebijakan dan program.

b). Akademisi :

- Menyediakan kajian ilmiah dan penelitian terkait gender untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
- Pengembangan kurikulum pendidikan yang memperkuat perspektif gender.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan seminar.

c). Pelaku Usaha/Swasta :

- Mengembangkan kebijakan perusahaan yang inklusif gender.
- Menyediakan kesempatan kerja yang adil dan program pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) yang berbasis gender.

d). **Media :**

- Mempromosikan isu-isu gender dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya PUG.
- Mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan yang berbasis data dan fakta.
- Menghindari stereotip gender dalam pemberitaan dan iklan.

e). **Masyarakat/LSM:**

- Menjalankan program pemberdayaan berbasis komunitas.
- Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.

Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG

Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah proses penilaian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk mengukur sejauh mana strategi PUG telah diimplementasikan dalam kebijakan, program, dan anggaran.

Evaluasi ini dilakukan menggunakan Pedoman Evaluasi Mandiri PUG yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dengan mengacu pada indikator Parameter Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (PPE).

Tujuan Evaluasi Mandiri PUG adalah :

- Menilai efektivitas implementasi strategi PUG di setiap sektor. Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penerapan kebijakan PUG. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis gender.
- Menentukan kategori capaian PUG berdasarkan standar PPE (Pratama, Madya, Utama, dan Mentor).

Evaluasi ini mencakup beberapa komponen utama yang dijadikan parameter dalam **Anugerah Parahita Ekapraya (PPE)**, antara lain:

Berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan PUG di suatu daerah atau instansi dikategorikan dalam **empat level PPE**:

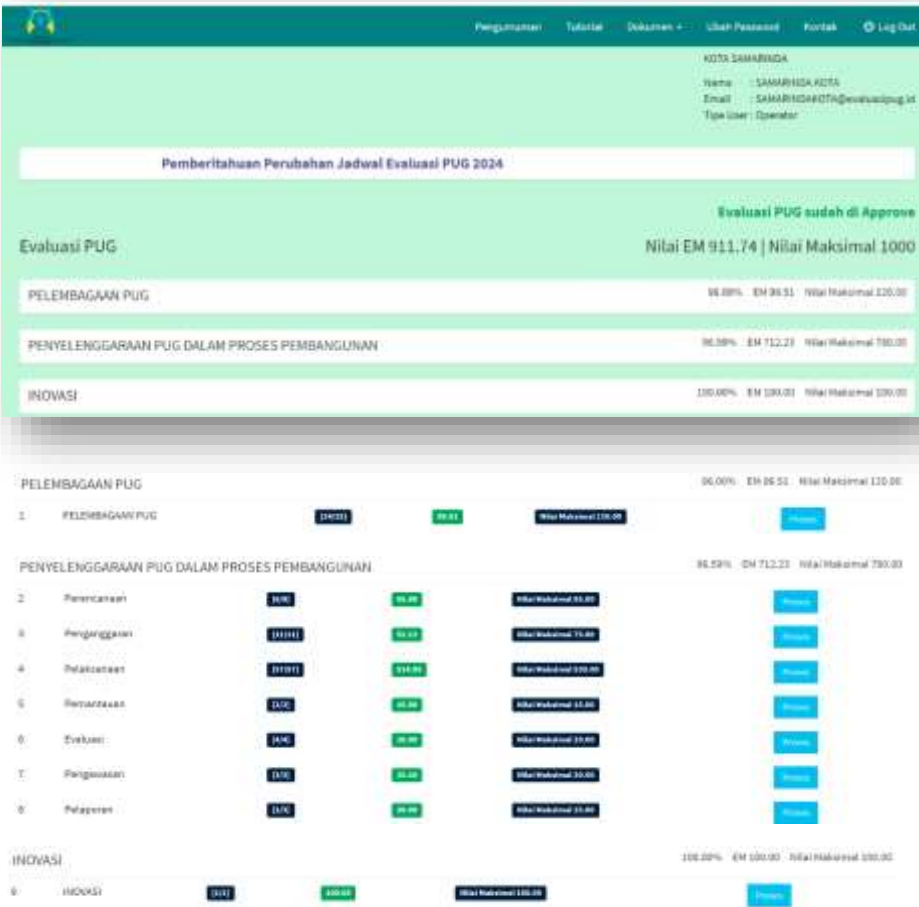
No	Komponen	Indikator yang Dinilai
1	Komitmen	Keputusan kepala daerah, regulasi terkait PUG, integrasi PUG dalam RPJMD/Renstra.
2	Kelembagaan PUG	Keberadaan Tim Driver PUG, focal point gender, SDM yang kompeten, mekanisme koordinasi.
3	Sumber Daya Manusia & Anggaran	Pelatihan PUG, jumlah anggaran responsif gender dalam APBD, dukungan dana untuk program PUG.
4	Data Gender	Ketersediaan data terpilah gender dalam berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dll.).
5	Analisis Gender dalam Program dan Kegiatan	Penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam perencanaan.
6	Keterlibatan Stakeholder	Kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi PUG.
7	Monitoring dan Evaluasi	Sistem pelaporan dan evaluasi capaian PUG serta tindak lanjut kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan PUG di suatu daerah atau instansi dikategorikan dalam **empat level PPE**:

Kategori	Deskripsi
Pratama	Pemerintah daerah mulai memahami dan berkomitmen terhadap PUG, tetapi implementasi masih terbatas.
Madya	PUG telah berjalan dalam beberapa aspek dengan kelembagaan yang lebih kuat.
Utama	Implementasi PUG telah menyeluruh di berbagai sektor dengan kebijakan dan program yang responsif gender.
Mentor	Pemerintah daerah telah menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi PUG dan memberikan pendampingan bagi daerah lain.

Tahun 2023 Kota Samarinda telah memperoleh predikat "Madya" dan pada Evaluasi Mandiri Tahun 2024 telah mengumpulkan Poin sebesar 911,74 dari total 1.00 poin. Tentunya seluruh Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG Kota Samarinda Optimis untuk meraih penghargaan kategori selanjutnya pada tahun 2025 sebagaimana aturan pemberian penghargaan diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali.





2.2.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

Dokumentasi ToT PPRG di Kota Solo 27 – 30 Mei 2024

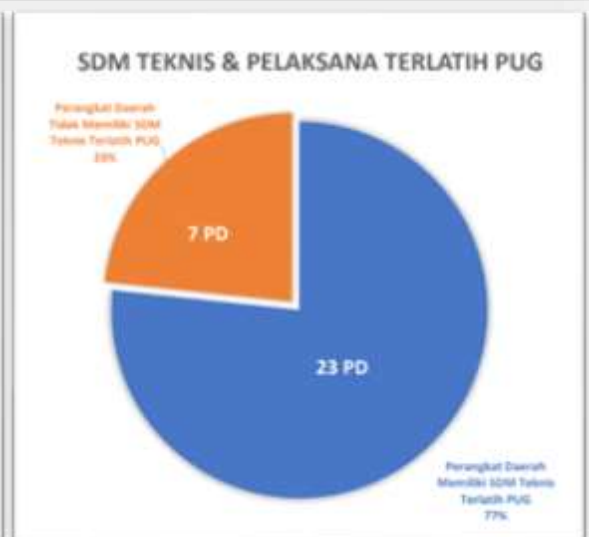
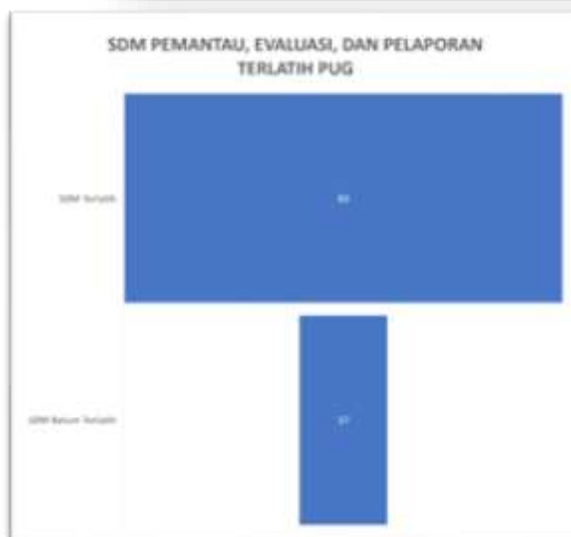


DATA PESERTA TOT PPRG SEMARANG 27 s/d 30 MEI 2024		
No	Nama Lengkap	Instansi
1	Darmiwanti,SE	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	FRANSISKA MARTINA	Dinas Kesehatan
3	Jumiati Ningsih	Sekretariat DPRD
4	Silvia Fauzia	Kecamatan Samarinda Ilir
5	Rahmadi Noor, SE	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Kundimah Syayuni Rasyid, SE	Inspektorat Kota Samarinda
7	Ageng Putranto	Disdukcapil
8	Widarini prahesti, SP.i	Dinas Perikanan
9	Emi Rubiharwati,SE	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
10	Margaretha Theresiana, SE	BPKAD
11	Leindha Eka Pertiwi S.STP M.Si	Kecamatan sungai kunjang
12	Lisnawati, SE	DPMPTSP Kota Samarinda
13	Nor Hidayah.SE	BKPSDM KOTA SAMARINDA
14	Muchsin, SH	Dinas Komunikasi dan informatika
15	Nila Aprilya,SKM	DP2KB
16	Ela Nurhayati,SE	Bapperida
17	Sutrisyanto	SATPOLPP
18	Noor Isnaniyah	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
19	Dwi Rizki Muliandari, S. Ip., M. Si	Bagian Tata Pemerintahan Setda
20	Drs.Abdullah, M.Pd	Kecamatan Sungai Pinang Samarinda
21	Manda Oktavia Kusminarti	Kecamatan Samarinda Ulu
22	Siti Komariyah	BKPSDM KOTA SAMARINDA
23	Syarifuddin Nur	DP2PA
24	Nanang Supratman	DP2PA
25	Daisylita, S.Sos	Disdukcapil
26	Abdul Hamid Bagus S., A.Md	Inspektorat
27	Nadilla Islamika, S.Pd	Inspektorat Kota Samarinda
28	Lily Erlianti, S.H., M.H.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
29	H. Siami Misnam	Dinas Perhubungan
30	Yusliani Ekayanti,S.Sos	Kecamatan Samarinda Seberang

Bimtek PPRG bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Kegiatan dilaksanakan tanggal 30 Juli 202024 sampai 2 Agustus 2024 dengan materi pembelajaran meliputi;

- a. Gender dan Pengarusutamaan Gender
- b. Analisis Gender dan Data Terpilah
- c. Mekanisme Pengintegrasian Gender Dalam Dokumen Perencanaan Makro (5 tahunan) dan Perencanaan Tahunan – Analisis Gender
- d. Praktek Penyusunan Dokumen Gender Perencanaan 5 Tahun (Renstra dan RPJMD)
- e. Praktek Penyusunan GAP, GBS, GAB dan KAK.



2.2.3 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG



Talkshow dengan tema "Implementasi PUG di Kota Samarinda" bekerjasama dengan KOPRI PC PMII dan Radio Heartline FM.





Seminar Gender Mainstreaming sekaligus Launching Program PUTARAN (Pusat Pembelajaran Perempuan).



Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG di Kecamatan Palaran

Pemilihan Gender Champion Samarinda (GCS Award) Tahun 2024.

Gender Champion menjadi salah satu media untuk menghargai Individu yang mempunyai kemampuan memberi pendampingan terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan/atau sebagai fasilitator baik penggiat gender maupun individu yang peduli gender, sehingga mampu mendorong dan menginspirasi masyarakat pada umumnya untuk mampu beraksi yang setara.

Tujuan Gender Champion adalah sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan atau laki-laki atas peran, dedikasi dan kontribusinya kepada lingkungan dan masyarakat, yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki kontribusi atau kiprah terhadap kesetaraan dan keadilan gender
- b) Memiliki peran pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Mampu meningkatkan kualitas hidup Perempuan, Anak, Lansia, Penyandang disabilitas dan masyarakat miskin serta mampu bekerjasama dengan berbagai pihak.
- d) Mampu melakukan penguatan keluarga baik dari segi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan



2.2.4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

**DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENINGKATAN PERAN FORUM PUSPA BUNGAH GERECEK KOTA SAMARINDA
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN SOSIAL
Samarinda, 13 Maret 2024
TAHUN 2024**



Car Free Day dalam rangka memperingati hari kartini



Sosialisasi Upaya Penanganan Dini bahaya Kebakaran



Seminar Peningkatan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan Sosial



Capacity Building PUSPAGA Cinta Syejati Kota Samarinda



Seminar Nasional & Musyawarah Nasional V Dharma Wanita Persatuan Kota Samarinda



2.2.5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Soft Skill UMKM Perempuan di Kota Samarinda, 06 Juni 2022



Pendampingan Desa Prima dalam Peningkatan Manajemen Usaha di Kecamatan Tahun 2024



Pendampingan Desa Prima Dalam Peningkatan Manajemen Usaha Keluarga di Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024



Pembinaan Desa Prima dalam rangka Peningkatan Manajemen Usaha Keluarga di Kecamatan, 11 Juli 2024





Pengembangan Soft Skill UMKM Perempuan di Kota Samarinda Tahun 2024



Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024



2.2.6 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Bimtek UMKM PEKKA "Strategri Branding dan Digital Marketing"



Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN)







BAB 3

HASIL DAN EVALUASI

3.1 Capaian Program

3.1.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Tujuan utama PUG adalah mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan.

Untuk mengukur capaian program PUG, beberapa indikator yang digunakan antara lain:

- **Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:** Meningkatnya jumlah perempuan di posisi kepemimpinan dan politik.
- **Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan:** Persentase perempuan yang mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan.
- **Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Ekonomi:** Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan.
- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Penurunan angka kematian ibu, peningkatan layanan kesehatan reproduksi.
- **Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender:** Pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.1.2 Indeks terkait penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Indeks merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai suatu kondisi berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG), indeks berperan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Beberapa indeks yang digunakan sebagai indikator PUG antara lain:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- Mengukur capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama: umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
- Semakin tinggi IPG, semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
- Semakin rendah IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.

3.2 Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) :

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan. IPG mengukur sejauh mana pembangunan manusia dinikmati secara adil oleh kedua gender.

Berikut adalah uraian mengenai IPM laki-laki dan perempuan sebagai dasar perhitungan IPG:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama:

- **Kesehatan** (harapan hidup saat lahir)
- **Pendidikan** (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah)
- **Standar hidup layak** (pengeluaran per kapita yang disesuaikan)

b) IPM Berdasarkan Gender

- **IPM Laki-laki** dihitung berdasarkan indikator yang sama, tetapi dengan data yang spesifik untuk laki-laki.
- **IPM Perempuan** dihitung dengan cara yang sama, tetapi menggunakan data yang khusus untuk perempuan.

c) Perhitungan IPG

IPG dihitung sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki:

$$IPG = \left(\frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki - laki}} \right) \times 100$$

Jika IPG mendekati 100, berarti kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan kecil. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPG, semakin besar ketimpangan pembangunan berdasarkan gender.

IPM LAKI-LAKI

Indikator IPM	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,64	↑ 72,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01	↑ 15,2
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	11,1	↑ 11,32
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	22,004	↑ 22,539
IPM	85,68	↑ 86,51

IPM PEREMPUAN

Indikator IPM	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	76,23	↑ 76,6
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,28	↑ 15,57
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,35	↑ 10,6
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	10,455	↑ 10,748
IPM	76,9	↑ 77,92

Sumber data : BPS Kota Samarinda

Jika dilihat capaian IPM Laki-laki dan Perempuan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator. Namun *Gap* / kesenjangan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan menunjukkan selisih yang cukup jauh khususnya pada indikator **Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan**.

Ketidakseimbangan **pengeluaran per kapita yang disesuaikan** antara laki-laki dan perempuan terjadi karena beberapa faktor struktural dan sosial-ekonomi, di antaranya:

1. Perbedaan Upah dan Pendapatan

- **Kesenjangan upah gender:** Perempuan sering kali mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang sama.
- **Jenis pekerjaan:** Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan bayaran lebih rendah.

2. Akses ke Sumber Daya Ekonomi

- Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi, seperti kepemilikan tanah, modal usaha, dan kredit.
- Peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

3. Beban Kerja Tidak Berbayar

- Perempuan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan domestik dan pengasuhan keluarga yang tidak menghasilkan pendapatan langsung.
- Hal ini mengurangi waktu yang bisa digunakan untuk bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang lebih tinggi.

4. Partisipasi dalam Angkatan Kerja

- Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah dibandingkan laki-laki karena faktor sosial dan budaya, seperti norma gender dan tanggung jawab rumah tangga.
- Banyak perempuan yang bekerja paruh waktu atau dalam kondisi kerja yang kurang stabil, sehingga pendapatan rata-rata mereka lebih kecil.

5. Diskriminasi Gender dalam Ekonomi

- Perempuan sering menghadapi hambatan struktural dalam promosi jabatan, sehingga lebih sedikit perempuan yang mencapai posisi manajerial atau eksekutif dengan gaji tinggi.
- Bias di tempat kerja bisa membuat perempuan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Akibat faktor-faktor tersebut, pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang kemudian berdampak pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang lebih rendah.

3.3 Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur tingkat keterwakilan dan peran aktif perempuan dalam tiga aspek utama: **partisipasi ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya ekonomi.**

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama dengan lima indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Ekonomi:
 - Persentase perempuan di tenaga profesional dan teknis
 - Persentase perempuan di posisi legislatif, pejabat tinggi, dan manajerial
2. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:
 - Persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan
3. Penguasaan Sumber Daya Ekonomi:
 - Pendapatan rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki
 - Pendapatan per kapita yang disesuaikan

IDG dihitung menggunakan pendekatan distribusi gender dalam berbagai aspek ekonomi dan politik. Secara umum, IDG dinyatakan dalam bentuk indeks yang menunjukkan sejauh

mana perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kendali ekonomi.

Rumus dasar IDG adalah kombinasi dari perhitungan kesetaraan gender dalam **pendapatan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan politik** dengan pembobotan yang telah ditentukan. Semakin rendah nilai IDG, semakin besar ketimpangan gender dalam akses ekonomi dan pengambilan keputusan.

IDG digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan kesetaraan dalam pemberdayaan gender, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan **ketimpangan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan**.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Samarinda	67,54	68,63	68,71
Kalimantan Timur	66,64	66,89	68,96

Sumber data : BPS Kota Samarinda

Berdasarkan data 2022-2023, tren IDG menunjukkan adanya **peningkatan bertahap**, tetapi masih terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam beberapa aspek.

- **Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor profesional** seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- **Kenaikan jumlah perempuan dalam posisi manajerial**, tetapi masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
- **Pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki**, terutama di sektor formal.

Meski IDG mengalami perbaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang membatasi kesempatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya ekonomi.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kota Samarinda, dari total 45 kursi DPRD yang tersedia, hanya 4 kursi (8,88%) yang berhasil diduduki oleh perempuan. Angka ini masih jauh dari target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diharapkan dan lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 15,5%

Nama-nama anggota DPRD Kota Samarinda periode 2024-2029 yang berjenis kelamin perempuan:

1. **Celni Pita Sari** (Partai NasDem) – Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Ulu
2. **dr. Sri Puji Astuti** (Partai Demokrat) – Dapil Samarinda Ulu

3. **Marlina** (Partai Demokrat) – Dapil Sungai Kunjang
4. **Riska Wahyuningsih** (Partai Gerindra) – Dapil Samarinda Utara dan Sungai Pinang

Dari keempat nama tersebut, **Celni Pita Sari** dan **dr. Sri Puji Astuti** merupakan petahana yang berhasil mempertahankan kursinya, sementara **Marlina** dan **Riska Wahyuningsih** adalah wajah baru di DPRD Kota Samarinda.

Rendahnya keterwakilan perempuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik di Kota Samarinda. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi perempuan dalam politik lokal guna mencapai keseimbangan representasi gender yang lebih baik.

3.4 Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) :

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ini menunjukkan sejauh mana perempuan mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

IKG memiliki skala dari 0 hingga 1, di mana:

- 0 berarti tidak ada ketimpangan gender (kesetaraan penuh).
- 1 berarti ketimpangan gender yang sangat tinggi.

IKG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama dengan lima indikator sebagai berikut:

1. Kesehatan Reproduksi:
 - Angka kematian ibu saat melahirkan (per 100.000 kelahiran).
 - Angka kelahiran remaja (per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun).
2. Pemberdayaan:
 - Persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan.
 - Persentase perempuan dan laki-laki dengan pendidikan menengah ke atas.
3. Partisipasi Ekonomi:
 - Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki.

Capaian IKG dapat diinterpretasikan sebagai berikut ;

IKG mendekati 0 → Ketimpangan gender rendah, artinya laki-laki dan perempuan memiliki akses yang hampir setara dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

IKG mendekati 1 → Ketimpangan gender tinggi, menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami hambatan signifikan dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.

IKG KOTA SAMARINDA TAHUN 2023



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	2023
Balikpapan	0,178
Samarinda	0,237
Bontang	0,314
Mahakam Ulu	0,362
Kalimantan Timur	0,414
INDONESIA	0,447
Paser	0,489
Kutai Kartanegara	0,49
Kutai Barat	0,491
Berau	0,502
Kutai Timur	0,532
Penajam Paser Utara	0,544

Kota Samarinda menempati urutan ke-2 setelah Balikpapan sebagai kota terendah nilai Indeks Ketimpangan Gender bahkan dibawah angka rata-rata Provinsi dan rata-rata Nasional. Hal ini menunjukkan capaian positif dan harus terus diupayakan dengan ;

- ❖ Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan keterampilan kerja.
- ❖ Mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan.
- ❖ Mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan formal.
- ❖ Memperkuat layanan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan ibu dan anak.

bahwa kesetaraan gender dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk memperkuat implementasi PUG melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif serta berkelanjutan.

No	Strategi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1	Penguatan Kelembagaan PUG	- Pelatihan PUG bagi aparatur pemerintah dan organisasi masyarakat. - Penguatan focal point gender di setiap instansi.	- Jumlah pelatihan yang dilakukan. - Jumlah instansi yang memiliki focal point gender.	Driver PUG (Bapperida, DP2PA, Inspektorat, BPKAD, TAPD), POKJA PUG, Focal Point PD
2	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi	- Penyediaan akses modal dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan. - Program pendampingan bisnis bagi UMKM perempuan.	- Jumlah perempuan yang mendapatkan akses modal dan pelatihan. - Peningkatan jumlah UMKM perempuan.	DP2PA, Dinas Koperasi & UKM, BUMD, Perbankan/ Lembaga Pembiayaan lain.
3	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Kepemimpinan	- Program mentoring dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. - Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan	- Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan kepemimpinan. - Peningkatan jumlah perempuan di	DP2PA, Kesbangpol, Partai Politik, LSM, KPU, DPRD

		perempuan dalam politik.	legislatif dan eksekutif.	
4	Kesetaraan Gender dalam Pendidikan	- Penyediaan beasiswa bagi anak perempuan yang kurang mampu. - Kampanye anti pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi perempuan.	- Jumlah penerima beasiswa perempuan. - Penurunan angka pernikahan dini.	DP2PA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PUSPAGA, Dina Kesehatan, Pengadilan Negeri, LSM
5	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	- Penguatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender. - Sosialisasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.	- Jumlah layanan perlindungan perempuan dan anak yang tersedia. - Penurunan kasus kekerasan berbasis gender.	DP2PA, Dinas Sosial, Kepolisian, Unit PPA Polres & Polsek, UPTD PPA, LSM

Implementasi rencana tindak lanjut PUG membutuhkan **komitmen kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat**. Dengan sinergi dan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan kesetaraan gender dapat tercapai dalam semua aspek kehidupan.